



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG



2023

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**



KATA PENGANTAR

Atas asung kerta waranugraha *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* /Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penyusunan “ Rencana Kinerja Tahunan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023 “ ini dapat terselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023 dan disusun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan serta akan memberikan target (quantitative objectives) tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam tahun yang bersangkutan.

Selanjutnya dokumen “Rencana Kinerja Tahunan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023“ ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2023, khususnya pada lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 2 Januari 2023

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Buleleng



Drs. Gede Sugantha Widiada, M.Si

NIP. 196703021989011001



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi BPKPD Kabupaten Buleleng	1
1.3. Tujuan Rencana Kinerja Tahunan	3
BAB II Perjanjian Kinerja	4
2.1. Sasaran/Capaian Program	4
2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama	4
BAB III Penutup	6

Lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang pada akhirnya nanti mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, perlu kedisiplinan dalam menyusun perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1.2. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng 51 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah, bahwa Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan membawahi Sekretariat, 6 (enam) Bidang dan UPTD, yaitu:
 1. Bidang Perencanaan Anggaran;
 2. Bidang Perbendaharaan;
 3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 4. Bidang Pendataan dan Pelayanan;



5. Bidang Penagihan dan Evaluasi;
 6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 7. UPTD.
- b. Sekretariat membawahi 1 (satu) Sub Bagian dan 2 (dua) Substansi, yaitu :
1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 2. Substansi Perencanaan; dan
 3. Substansi Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan Anggaran, membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan 1 (satu) Substansi, yaitu:
1. Sub Bidang Perencanaan Daerah;
 2. Sub Bidang Penyusunan Kebijakan Keuangan; dan
 3. Substansi Penyusunan Anggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan 1 (satu) Substansi, yaitu:
1. Sub Bidang Manajemen Kas;
 2. Sub Bidang Belanja; dan
 3. Substansi Transfer.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan 1 (satu) Substansi, yaitu:
1. Sub Bidang Akuntansi;
 2. Sub Bidang Pelaporan; dan
 3. Substansi Evaluasi dan Pembinaan.
- f. Bidang Pendataan dan Pelayanan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan 1 (satu) Substansi, yaitu:
1. Sub Bidang Pendataan;
 2. Sub Bidang Pelayanan; dan
 3. Substansi Perencanaan dan Kebijakan Pendapatan Daerah.
- g. Bidang Penagihan dan Evaluasi, membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan 1 (satu) Substansi, yaitu:
1. Sub Bidang Verifikasi Keberatan dan Pemeriksaan Pajak;
 2. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah; dan
 3. Substansi Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
- h. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi 2 (dua) Sub Bidang dan 1 (satu) Substansi, yaitu:
1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Penatausahaan;
 2. Sub Bidang Pengamanan dan Penilaian; dan
 3. Substansi Pemanfaatan dan Penghapusan.
- i. UPTD



1.3. Tujuan Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi;
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik;
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah;
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah;
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.1. Sasaran/Capaian Program

Sasaran/Capaian Program merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng.

Sasaran/Capaian Program menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023.

2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.



Indikator Kinerja dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja utama, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2023 sebagai Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan. (Lampiran Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)



BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng ini merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para Kepala Perangkat Daerah diharapkan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya tentunya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 2 Januari 2023

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

Dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Buleleng



Drs. Gede Sugantha Widiada, M.Si

NIP. 1960030198901 1 001

LAMPIRAN KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2023
BPKPD KABUPATEN BULELENG



**LAMPIRAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023**

Sasaran/Capaian Program		Target/Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan	
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Outcome			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Opini WTP	1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1 Persentase penyusunan anggaran daerah yang tepat waktu	1.857.728.709,00	1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan KUA/ PPAS dan Perubahan KUA/Perubahan PPAS	201.284.000,00	
								2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		224.730.266,00	
								3 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		4.470.000,00	
								4 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan		4.470.000,00	
								5 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		3.720.000,00	
								6 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		3.720.000,00	
								7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		530.513.006,00	
								8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		597.321.583,00	

Sasaran/Capaian Program		Target/Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Outcome		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							9 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Laporan bahan penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	270.014.120,00	
								Jumlah Laporan bahan dan informasi Kebijakan Bidang Anggaran		
							10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan KUA/ PPAS dan Perubahan KUA/Perubahan PPAS	1.242.867,00	
							11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		1.242.867,00	
							12 Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD memperoleh Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	
				2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1 Persentase pelayanan perbendaharaan daerah	1.568.201.151,00	1 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	91.632.920,00	
							2 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.554.738,00	

Sasaran/Capaian Program		Target/Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan	
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Outcome			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	92.566.300,00	
							4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah laporan pencairan SP2D tepat waktu	2.964.026,00	
							5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	Jumlah laporan dana perimbangan sesuai syarat salur tepat waktu	191.586.961,00	
							6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	116.999.207,00	
							7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi dana perimbangan	216.515.051,00	

Sasaran/Capaian Program		Target/Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Outcome		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							8 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	143.741.280,00	
							9 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah laporan pencairan SP2D tepat waktu	419.237.323,00	
							10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	14.424.338,00	
							11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pembinaan SKPD	263.979.007,00	

Sasaran/Capaian Program		Target/Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Outcome		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1 Persentase penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu	949.220.303,00	1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	135.787.865,00	
							2 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	148.811.274,00	
							3 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan keuangan pemerintah daerah	273.505.161,00	
							4 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	124.048.893,00	

Sasaran/Capaian Program		Target/Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Outcome		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							5 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	72.188.765,00	
							6 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah laporan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	25.567.005,00	
							7 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian daerah yg telah ditindaklanjuti	6.625.656,00	
							8 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen draf kebijakan dan panduan teknis penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah	83.638.415,00	

Sasaran/Capaian Program		Target/Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Outcome		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							9 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah laporan hasil pembinaan	57.168.607,00	
							10 Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	21.878.662,00	
				4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Persentase penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu	283.231.139.428,00	1 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan data statistik keuangan dari Dana Perimbangan, Dana Transfer lainnya dan Dana Desa	229.977.284.500,00	
							2 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		18.100.000.000,00	
							3 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyaluran Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan Partai Politik, Belanja Transfer ke Desa dan Dana Darurat dan Mendesak tepat waktu	35.153.854.928,00	
				5 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1 Persentase penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu	306.888.342,00	1 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah transaksi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	1.750.000,00	
							2 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen rekonsiliasi laporan SKPD	280.138.342,00	

Sasaran/Capaian Program		Target/Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan					
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Outcome							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
							3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan keuangan pemerintah daerah	25.000.000,00					
2	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik	100%	2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Persentase barang milik daerah yang dikelola dengan baik	1.418.448.905,00	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	100.008.818,00	
								2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	8.683.086,00				
								3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	8.661.000,00				
								4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.828.720,00				
								5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	63.202.467,00				
								6	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan pengamanan BMD	436.500.326,00				
								7	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penilaian BMD yang diusulkan tepat waktu	245.180.855,00				
								8	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen pengendalian dan pengawasan BMD	112.655.904,00				

Sasaran/Capaian Program		Target/Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Outcome		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							9 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan yang telah diproses sesuai usulan tepat waktu	161.648.189,00	
							10 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	125.876.720,00	
							11 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	88.889.220,00	
							12 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pembinaan BMD	60.313.600,00	
3	Terwujudnya PAD yang sesuai target	Jumlah realisasi PAD	Rp420.379.886.115	3 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Persentase penagihan pajak daerah dan evaluasi pendapatan daerah	7.673.270.017,00	1 Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah laporan penyediaan Dokumen Rencana/Rancangan Peraturan Tentang Pengelolaan Pajak Daerah	309.668.171,00
						2 Persentase pendataan dan pelayanan PAD		2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis/Kebijakan Pajak Daerah dan Pengembangan Pajak Daerah	11.629.250,00

Sasaran/Capaian Program		Target/Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Outcome		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	47.771.500,00	
							4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah laporan tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah	1.198.823.712,00	
							5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan potensi pajak dan wajib pajak	93.380.000,00	
						6 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	311.194.823,00			
						7 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	185.406.560,00			
							8 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah laporan penetapan Wajib Pajak Daerah	64.780.635,00	
							9 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah laporan Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah tepat waktu	951.260.358,00	
							10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah laporan analisa resiko dan evaluasi pelaporan pajak daerah	143.502.403,00	

Sasaran/Capaian Program		Target/Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Outcome		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							11 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah laporan Capaian Penagihan Piutang Pajak Daerah, Surat Teguran, Tagihan Denda, Realisasi Pajak Daerah	281.558.006,00	
							12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelayanan keberatan dan pengurangan nilai pajak tepat waktu	121.469.660,00	
							13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan data pemeriksaan pajak daerah	102.402.220,00	
							14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	359.832.248,00	
							15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring ETPD	81.230.000,00	
							1 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak	261.150.481,00	UPTD PAD Buleleng I
							2 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Layanan Wajib Pajak yang dilayani	256.117.500,00	UPTD PAD Buleleng I
							3 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil penagihan pajak daerah	522.892.846,00	UPTD PAD Buleleng I

Sasaran/Capaian Program		Target/Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Outcome		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	476.115.820,00	UPTD PAD Buleleng II
							2 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Layanan Wajib Pajak yang dilayani	403.060.010,00	UPTD PAD Buleleng II
							3 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil penagihan pajak daerah	498.879.012,00	UPTD PAD Buleleng II
							1 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	182.327.687,00	UPTD PAD Buleleng III
							2 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Layanan Wajib Pajak yang dilayani	241.137.843,00	UPTD PAD Buleleng III
							3 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil penagihan pajak daerah	567.679.272,00	UPTD PAD Buleleng III
4	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Nilai AKIP yang baik 2 Persentase penyebaran kuesioner pengguna layanan	85.554.000,00	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.969.000,00	
							2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		3.250.000,00	
							3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		3.500.000,00	
							4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1.750.000,00	
							5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		6.710.000,00	

Sasaran/Capaian Program		Target/Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Outcome		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2.454.000,00	
							7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.921.000,00	
				2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Persentase layanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	21.620.389.633,00	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan administrasi keuangan	20.989.092.633,00	
							2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		158.064.480,00	
							3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		441.578.520,00	
							4 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		31.654.000,00	
				3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Persentase layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	3.500.000,00	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3.500.000,00	
				4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Persentase layanan kepegawaian yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	109.900.000,00	1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	66.400.000,00	
							2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		43.500.000,00	

Sasaran/Capaian Program		Target/Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Outcome		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Persentase layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	1.749.236.121,00	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Administrasi Perkantoran	75.285.830,00	
							2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		780.386.250,00	
							3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		18.587.650,00	
							4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		434.122.683,00	
							5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		30.445.608,00	
							6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3.780.000,00	
							7 Fasilitasi Kunjungan Tamu		75.846.100,00	
							8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		195.676.000,00	
							9 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		7.356.000,00	
							10 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		127.750.000,00	
				6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		122.433.000,00	1 Pengadaan Mebel	Jumlah Laporan Administrasi Perkantoran	122.433.000,00	

Sasaran/Capaian Program		Target/Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Keterangan
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Uraian	Indikator Outcome		Uraian	Indikator Outcome		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.252.276.274,00	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		119.525.600,00	
							2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		515.001.000,00	
							3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		332.742.000,00	
							4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		285.007.674,00	
				7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.276.664.464,00	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		905.043.680,00	
							2 Pemeliharaan Mebel		13.000.000,00	
							3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		21.100.000,00	
							4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		246.990.784,00	
							5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung		90.530.000,00	



Singaraja, 2 Januari 2023

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng

Drs. Gede Susilana Widiada, M. Si

NIP. 196706021989011001